

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha suatu dalam negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita suatu negara. Suatu pembangunan ekonomi wajib dilakukan oleh negara dalam meningkatkan taraf hidup beserta kesejahteraan masyarakatnya. Untuk dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang baik pemerintah Indonesia telah menciptakan berbagai program pemberdayaan yang berfokus pada kewirausahaan. Program tersebut dikenal dengan sebutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM sebagai tempat dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi negara dalam sektor usaha (Nuvitasari, et al., 2019).

Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai entitas bisnis yang dioperasikan oleh individu, perusahaan perorangan, rumah tangga, atau badan usaha skala kecil, yang klasifikasinya didasarkan pada pendapatan tahunan, jumlah tenaga kerja, serta nilai aset yang dikelola. Kehadiran UMKM di Indonesia memegang peranan krusial dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana dilaporkan oleh Kompas.com ([money.kompas.com](http://money.kompas.com)), sektor UMKM memberikan kontribusi PDB (Produk Domestik Bruto) tertinggi dan terbukti memiliki ketahanan yang kuat bahkan di tengah gejolak krisis ekonomi. Lebih lanjut, keberadaan UMKM di Indonesia berkontribusi signifikan dalam menangani isu-isu

ketimpangan ekonomi di masyarakat, termasuk dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran, memfasilitasi pemerataan ekonomi, serta meningkatkan taraf pendapatan masyarakat (Artini, 2019).

Bedasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2022, melalui United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam laporannya, ASEAN Investment Report 2022 menyebutkan, bahwa pelaku UMKM yang tercatat sebanyak 65,46 juta pelaku UMKM, dimana jumlah UMKM tersebut memiliki kontribusi sebesar 60,3% terhadap PDB dan mampu menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Hingga kini keberadaan UMKM di setiap provinsi terus mengalami peningkatan, salah satunya yaitu di Provinsi Bali.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan UMKM yang signifikan, didorong oleh sektor pariwisata dan berbagai program pemberdayaan dari pemerintah menjadikan Provinsi Bali mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Bali. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, pada tahun 2019 hingga tahun 2023 perkembangan UMKM di provinsi Bali terus mengalami peningkatan di beberapa kabupaten/kota. Tidak tanggung-tanggung jumlah UMKM di Bali di tahun 2019 mencapai 325.971 unit dan di tahun 2023 meningkat menjadi 439.382 unit, hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2019 hingga tahun 2023 UMKM di Bali telah mengalami peningkatan sebesar 113.411 unit umkm.

Kabupaten Buleleng diakui sebagai kontributor signifikan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat Provinsi Bali. Analisis performa UMKM di Kabupaten Buleleng selama periode empat tahun, dari 2020

hingga 2024, menunjukkan adanya apresiasi yang substansial. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah (Dagperinkop-UKM) Kabupaten Buleleng pada tahun 2024, jumlah entitas UMKM pada tahun 2020 dilaporkan sebesar 34.374 unit. Terdapat lonjakan yang mencolok pada tahun 2021 dengan angka mencapai 54.489 unit, yang kemudian terus mengalami ekspansi pada tahun 2022 menjadi 57.216 unit. Dinamika pertumbuhan ini semakin terakselerasi pada tahun 2023, dengan total UMKM mencapai 66.368 unit, dan pada akhir tahun 2024 tercatat sebanyak 79.470 unit. Kenaikan tahunan dalam jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng ini mengindikasikan peran vital UMKM dalam menopang stabilitas ekonomi regional, yang dipengaruhi oleh berbagai katalisator seperti regulasi pemerintah yang mendukung, fasilitasi akses terhadap sumber pendanaan usaha, serta adopsi teknologi digital dalam operasional bisnis. Namun dibalik data yang memperlihatkan peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng yang cukup signifikan fakta yang terjadi di lapangan ditemukan beberapa aspek yang memunculkan permasalahan yang berkaitan dengan kinerja UMKM. Hal ini tergambarkan melalui tidak adanya peningkatan kinerja yang dialami UMKM selama mengembangkan usahanya.

Bedasarkan data Balitbag Kabupaten Buleleng dan LP2M Undiksha tahun 2020, tantangan yang dihadapi UMKM tidak lepas dari penurunan jumlah penjualan yang signifikan, penurunan laba, serta keterbatasan modal dalam pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah UMKM yang signifikan di Kabupaten Buleleng, namun tidak selaras dengan keberlangsungan usaha mereka yang masih menghadapi tantangan yang perlu dikaji lebih dalam.

**Tabel 1**  
**Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng**

No	Aspek	Rata-Rata Persentase
1.	Penurunan Penjualan	62%
2.	Penurunan Laba Usaha	61%
3.	Permasalahan Modal	Dialami oleh 71,4% UMKM

(Sumber : Balitbang Kab. Buleleng & LP2M Undiksha, 2020)

Berdasarkan analisis Tabel 1, dapat dilihat bahwa penurunan substansial dalam performa finansial Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Buleleng, dengan rerata penurunan penjualan mencapai 62% dan penurunan profitabilitas sebesar 61%. Indikasi ini menggarisbawahi bahwa hambatan fundamental yang dihadapi oleh para enterpreuner UMKM di wilayah tersebut adalah strategi mempertahankan daya saing dan pencapaian ekspansi bisnis yang kontinyu. Lebih lanjut, 74% dari para pelaku usaha juga mengeluhkan kesulitan dalam mengakses kapital untuk ekspansi operasional. Morfologi penurunan kapabilitas UMKM di Kabupaten Buleleng dalam menghasilkan pendapatan penjualan merefleksikan implikasi dari defisiensi dalam efisiensi manajemen finansial, padahal perencanaan keuangan merupakan elemen krusial dalam peningkatan performa finansial entitas bisnis (Faisal, et al., 2017).

Permasalahan permodalan hingga saat ini masih menjadi tantangan terbesar bagi para UMKM. Alokasi modal yang efektif dalam sebuah entitas bisnis berpotensi mengantarkan pada pencapaian kinerja finansial yang superior, seraya berkontribusi pada keberlanjutan operasi bisnis di masa mendatang (Hutabarat et al., 2022). Ketersediaan modal yang memadai dalam sebuah pelaku usaha secara inheren berperan dalam mengoptimalkan performa bisnis (Octaviani & Putri, 2021). Data yang

dipublikasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa hambatan permodalan UMKM di wilayah Kabupaten Buleleng merupakan persoalan kronis yang semakin diperparah dengan merebaknya pandemi covid-19 di awal tahun 2020. Periode tersebut menyaksikan proporsi UMKM di Kabupaten Buleleng yang menghadapi kesulitan permodalan mencapai 45,71%, dan bahkan pasca-fase awal pandemi berakhir, persentase permasalahan permodalan di Kabupaten Buleleng melonjak menjadi 71,4%. Kenaikan substansial ini menegaskan dampak signifikan yang ditimbulkan oleh tantangan permodalan sebagai konsekuensi dari pandemi covid-19.

Peningkatan pendapatan dalam suatu UMKM dapat diukur dari berbagai hal yang mengacu pada keberhasilan para pelaku usaha dalam menghasilkan laba usaha. Turunnya tingkat pendapatan yang dialami para pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng di tahun 2024 menunjukkan bahwa keadaan keuangan para pelaku UMKM belum cukup baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zumaroh (2021) dikatakan bahwa usaha yang berkembang dapat dilihat dari bagaimana para pelaku usaha tersebut dalam mempertahankan operasional usahanya termasuk meningkatkan pencapaian laba usaha secara terus menerus. Dalam hal ini para pelaku usaha harus melakukan upaya agar dapat mempertahankan operasional usahanya sehingga dapat mencegah adanya penurunan pendapatan dalam usaha, selain itu upaya tersebut juga wajib dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menghindari lemahnya pengelolaan keuangan seperti akuntansi yang tidak tertata, dan kurangnya laporan keuangan yang valid.

Peningkatan pendapatan dalam suatu usaha disebabkan oleh penggunaan kinerja keuangan yang baik. Indikator yang mempengaruhi kinerja keuangan tertuang dalam salah satu teori yang dikenal sebagai Resource-Based Theory (RBT). Resource-Based Theory (RBT) yang dikemukakan Wernerfelt (1984) merupakan suatu teori dimana suatu usaha mampu mencapai keunggulan bersaing dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang berkualitas dalam suatu usaha dapat mendukung peningkatan kinerja jangka panjang dan membantu perusahaan menjadi lebih kompetitif dan unggul dibandingkan pesaingnya. Teori ini menyatakan bahwa pentingnya memanfaatkan sumber daya internal dan eksternal dalam suatu usaha (Murtini dkk., 2022). Entitas sumber daya usaha yang dikemukakan mencakup sumber daya modal fisik, yang meliputi aspek-aspek seperti teknologi yang diaplikasikan, fasilitas manufaktur, perangkat keras, lokasi operasional, dan akses terhadap input material. Mencakup sumber daya modal manusia, yang merujuk pada akumulasi pengalaman, kompetensi, dan kapabilitas kognitif yang dimiliki oleh para pengusaha. Terakhir, mencakup sumber daya modal organisasi, yang berkaitan dengan mekanisme pelaporan, strategi perencanaan, serta prosedur pengawasan yang berlaku, baik secara internal dalam organisasi maupun dalam interaksinya dengan ekosistem eksternal (Barney, 1991). Untuk konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), setiap entitas bisnis mengidentifikasi sumber dayanya, seperti adopsi transaksi daring melalui e-commerce beserta kerangka supply chain management yang berfungsi sebagai komponen modal fisik. Sementara itu, mekanisme peer to peer lending diakui sebagai aset modal manusia. Sejalan dengan paradigma Teori Berbasis Sumber Daya (Resource-Based View), dikemukakan bahwa organisasi yang memiliki kapabilitas

kompetitif harus menguasai sumber daya yang langka, bernilai strategis, sulit untuk ditiru oleh pesaing, dan tidak mudah digantikan (Barney, 1991).

Bedasarkan *Resource-Based Theory (RBT)* faktor pertama yang mempengaruhi pendapatan usaha melalui kinerja keuangan yaitu fasilitas peer to peer lending sebagai sumber daya modal manusia. Modal merupakan aspek penting dalam mengembangkan suatu usaha, meskipun demikian masalah permodalan masih saja menjadi masalah utama UMKM. Tingginya tingkat permasalahan permodalan di Kabupaten Buleleng membuat pemerintah setempat mengambil beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan yaitu berupa pemberian bantuan KUR dengan memberikan potongan bunga kepada UMKM. Namun berdasarkan data di Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng penyaluran bantuan KUR oleh pemerintah hanya sebesar 7% atau sebanding dengan 4.019 UMKM dari total UMKM sebanyak 54.489 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan bantuan modal dari pemerintah. Tidak hanya itu pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan seperti bank cenderung kurang diminati oleh pelaku usaha tidak hanya karena bunga yang ditawarkan cukup tinggi sulitnya proses pengajuan pinjaman juga membuat para pelaku usaha kurang berminat dalam meminjam dana di bank, tentunya hal ini menyebabkan permasalahan modal masih menjadi permasalahan utama para UMKM.

Mengacu pada perkembangan teknologi saat ini, banyak perusahaan keuangan di Indonesia yang menawarkan pinjaman berupa modal kepada para pelaku usaha dengan bunga yang relatif rendah dibandingkan bunga di bank. Salah satu fasilitas

keuangan yang memberikan pinjaman secara *online* yaitu fasilitas *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* merupakan fasilitas keuangan yang menghubungkan kreditur dan debitur secara *online*, platform keuangan ini lebih menguntungkan daripada *platform* keuangan konvensional (Purnamasari, 2024). Regulasi yang matang mendorong dan memotivasi UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan memungkinkan transaksi peminjaman yang mudah melalui teknologi keuangan (Harini Slamet & Syaifulloh, 2020). Berdasarkan data OJK tahun 2023, transaksi pembiayaan UMKM oleh industry non bank yang dalam hal ini seperti penggunaan fasilitas *financial technology peer to per lending* telah mencapai Rp51,46 triliun atau tumbuh sebesar 28,11% dari seluruh pembiayaan yang dilakukan oleh *financial technology peer to per lending*. Presentasi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *financial technology* lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan.

Menurut penelitian Zella (2025) menyatakan bahwa penggunaan *financial technology* khususnya *peer to peer lending* memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM kuliner di Kecamatan Telanaipura. Selajan dengan penelitian sebelumnya, penelitian Aryana, et al, (2024) juga menyatakan bahwa *peer to peer lending* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Brebes. Namun berbeda dari dua penelitian sebelumnya penelitian Sari (2023) tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya dimana penelitian ini menyatakan bahwa fasilitas pinjaman *peer to peer lending* tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan.

Faktor kedua yang mempengaruhi sumber daya dalam *Resource-Based Theory* (RBT) sebagai sumber daya modal fisik yaitu transaksi online (*e-commerce*). Kemajuan

teknologi saat ini tentunya sangat membantu para pelaku usaha dalam melebarkan pangsa pasarnya, namun pada kenyataannya seringkali para pelaku UMKM tidak memiliki ketrampilan yang baik dalam mengupayakan penggunaan teknologi tersebut secara efektif. Salah satu media transaksi elektronik yang mampu membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan pendapatannya yaitu transaksi *online (e-commerce)*. Transaksi *online (e-commerce)* merupakan suatu wadah pemanfaatan internet dalam transaksi penjualan, pembelian, pemasaran, sarana untuk memperluas pangsa pasar demi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari sebelumnya (Joseph et, al., 2020).

Pengembangan bisnis melalui transaksi *online (e-commerce)* merupakan strategi untuk mempertahankan pertumbuhan penjualan suatu usaha (Prasetyo & Fazariyawan, 2020). Selain mampu menjangkau konsumen lebih banyak lagi penggunaan fasilitas *e-commerce* juga memberikan dampak baik dalam sektor akuntansi dalam usaha. Penggunaan *e-commerce* dapat menjadi media akuntansi yang efektif dalam suatu usaha karena dapat melakukan pelacakan otomatis terhadap transaksi, investaris, dan pendapatan. Dengan adanya sistem akuntansi ini data dapat disinkronisasikan secara *real time*, memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan (Syaiful Rizal, et al., 2023).

Penggunaan fasilitas *e-commerce* dalam UMKM khususnya UMKM di Kabupaten Buleleng sudah mulai banyak diterapkan sebagai tempat untuk mengembangkan usahanya, namun sayangnya belum dapat berjalan dengan efektif. Dimana para pelaku usaha masih banyak yang belum memahami penggunaan media *e-commerce* dalam mengembangkan usahanya, meski demikian sudah banyak juga para

pelaku UMKM yang sudah mulai menggunakan media ini sebagai media pengembangan, pemasaran, dan penjualan produk meskipun belum secara menyeluruh dan optimal dalam penggunaan media tersebut.

Bedasarkan penelitian yang dilakukan Desian, et al.(2024) menyatakan bahwa pemanfaatan media *e-commerce* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM di Kota Tasikmalaya. Sejalan dengan penelitian tersebut menurut penelitian yang dilakukan Aprilyan, et al. (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan transaksi *online* ini berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Lombok Barat yang artinya semakin tinggi penggunaan *e-commerce* pada UMKM maka, semakin meningkat pendapatan UMKM di Kabupaten Lombok Barat. Namun menurut Habiba & Prasetyia (2022) dalam penelitiannya bahwa variabel penerapan *e-commerce* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

Faktor ketiga yang mempengaruhi sumber daya dalam *Resource-Based Theory (RBT)* sebagai sumber daya modal fisik yaitu *supply chain management*. Ketrampilan pelaku usaha yang baik tentunya dapat mempengaruhi pengembangan usaha tersebut. Dalam hal ini pengembangan ketrampilan para pelaku usaha guna membangun kinerja usaha yang baik dapat dilakukan dengan menerapkan sistem *supply chain management (SCM)*. Sistem *supply chain management (SCM)* atau rantai pemasok merupakan strategi pelaku usaha dalam mengintegrasikan setiap tahap produksi dari bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen dengan cara yang paling efisien dan efektif, untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Implementasi SCM dalam suatu usaha merupakan hal yang penting. Menurut Putra (2020) suatu usaha yang tidak melakukan *Supply Chain Management* dalam operasional usahanya maka akan mengalami kebangkrutan sebab, biaya-biaya yang dikeluarkan tidak bisa terkontrol dengan baik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan SCM yang optimal berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja UMKM, dimana penerapan SCM dalam suatu usaha mampu memastikan pengambilan keputusan yang sehat yang nantinya berpengaruh pada penjualan serta arus kas usahanya. Dengan SCM yang baik, UMKM dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan margin keuntungan, yang tercermin dalam laporan keuangan mereka.

Penerapan Supply Chain Managemen di Kabupaten Buleleng masih sangat sedikit, hal ini disebabkan oleh minimnya pelaku UMKM dalam mengadopsi praktik rantai pasokan yang optimal pada siklus produksi mereka. Merujuk pada temuan studi oleh Darma., et al. (2020), seluruh entitas bisnis yang memproduksi dodol khas Buleleng di Desa Petangglan, Buleleng, menghadapi kendala dalam mengestimasi kebutuhan material mentah untuk produksi dodol tersebut ketika menerima pesanan. Kendala ini timbul akibat aplikasi manajemen rantai pasok material mentah yang kurang memadai dalam menjalankan operasional sehari-hari. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, adopsi manajemen rantai pasok yang efektif berpotensi untuk merasionalisasi beragam pos pengeluaran operasional bisnis.

Berdasarkan penelitian Saputri (2024) yang menyatakan bahwa manajemen rantai pasokan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut penelitian Windayani (2021) menyatakan bahwa penerapan *Supply*

*Chain Management* (SCM) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kapasitas keuangan UMKM yang juga diukur dengan meningkatnya pendapatan serta laba yang dihasilkan oleh suatu usaha. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kurniawan (2017) yang menyatakan bahwa *Supply Chain Management* (SCM) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan batik di Pekalongan yang diukur dengan pendapatan serta laba yang dihasilkan.

Inkonsisten variabel-variabel penelitian, meliputi fasilitas *peer to peer lending*, transaksi *online (e-commers)*, dan *supply chain management* terhadap peningkatan pendapatan UMKM melatarbelakangi pengujian untuk kembali menguji antara variabel-variabel tersebut. Mengacu pada penelitian terdahulu, penelitian mengenai peningkatan pendapatan UMKM telah banyak dilakukan, hanya saja diuji dengan beberapa indikator yang berbeda. Kebaruan atau GAP dalam penelitian ini yaitu terletak pada variabel penelitian dan subjek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan variabel fasilitas *peer to peer lending*, transaksi *online (e-commers)*, dan *supply chain management* sebagai variabel independent, sedangkan subjek penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini memilih subjek penelitian di Kabupaten Buleleng karena Kabupaten Buleleng menjadi salah satu kabupaten dengan jumlah persebaran UMKM cukup tinggi di Bali namun tidak dibarengi dengan tingkat kinerja yang baik yang berpengaruh terhadap pendapatan UMKM, sehingga perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan didukung penelitian - penelitian terdahulu dengan hasil yang kurang konsisten maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian yang serupa dengan menggunakan peningkatan pendapatan usaha sebagai variabel dependen dan tiga variabel independen lainnya yaitu fasilitas *peer to peer lending*, transaksi *online (e-commers)*, dan *supply chain management*. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Fasilitas Peer To Peer Lending, Transaksi Online (e-commers), dan Supply Chain Management, Terhadap Pendapatan Pada UMKM (Studi Kasus : UMKM di Kabupaten Buleleng)”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah yang disajikan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Terjadi peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng tahun 2019 hingga 2023 yang signifikan namun tidak dibarengi dengan performa kinerja yang baik sehingga cenderung *stuck* selama pelaksanaan usaha, hal ini tentunya berdampak kepada peningkatan pendapatan UMKM tersebut.
2. Para pelaku UMKM Kabupaten Buleleng mengalami kendala akses keuangan, akses teknologi modern, dan juga pengembangan ketrampilan para pelaku usaha hal ini berpengaruh terhadap peningkatan dan penurunan pendapatan UMKM di Kabupaten Buleleng.
3. Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng hingga saat ini masih kesulitan dalam akses keuangan usaha, penggunaan fasilitas *peer to peer lending* di Kabupaten Buleleng yang kurang dikenal menyebabkan para pelaku usaha kesulitan dalam mengakses modal secara *online*.

4. Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng belum optimal dalam menggunakan *e-commerce* dalam menjalankan usahanya, sehingga kurang berjalan dengan efektif.
5. Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng kurang menerapkan manajemen rantai pasokan atau *supply chain management* yang baik dalam usahanya sehingga mempengaruhi pendapatan usaha.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Bedasarkan pemaparan identitas masalah diatas maka untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan dan mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini peneliti memfokuskan kepada variabel yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM yang meliputi fasilitas *peer to peer lending*, transaksi *online (e-commerce)*, dan *supply chain management* guna menilai pengaruhnya terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Buleleng.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah fasilitas *peer to peer lending* berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Buleleng?

2. Apakah transaksi *online (e-commerce)* berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah *supply chain management* berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Buleleng?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh fasilitas *peer to peer lending* terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menguji pengaruh penggunaan transaksi *online (e-commerce)* terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk menguji pengaruh *supply chain management* terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kabupaten Buleleng.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikann manfaat bukan hanya bagi pribadi peneliti, tetapi juga dapat bermanfaat khususnya pada lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha dan masyarakat luas pada umumnya. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris serta pengetahuan yang mendalam tentang pengaruh fasilitas *peer to peer pending*,

transaksi *online (e-commerce)*, dan *supply chain management (SCM)* terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Buleleng.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang penggunaan fasilitas *peer to peer pending*, transaksi *online (e-commerce)*, dan *supply chain management (SCM)* dalam pendapatan UMKM di Kabupaten Buleleng.

### b. Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan para pelaku usaha terkait strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan usaha dengan memanfaatkan penggunaan fasilitas *peer to peer pending*, transaksi *online (e-commerce)*, dan *supply chain management (SCM)*.

### c. Bagi Pemerintah di Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan pendapatan UMKM di daerahnya seperti memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman dana, dan melakukan arahan terhadap UMKM terkait pentingnya fasilitas *peer to peer pending*, penerapan transaksi *online (e-commerce)*, dan *supply chain management (SCM)* dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Kabupaten Buleleng.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber bacaan serta dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian terkait secara lebih lanjut.

